

## LAMPIRAN

### PANDUAN WAWANCARA

Pendahuluan:

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memperoleh informasi untuk melengkapi data-data yang telah ada dengan bertanya secara langsung kepada narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan untuk mencari informasi terkait pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Dari informasi yang diperlukan, saya akan melakukan wawancara kepada Kepala SubBid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepala SubBid Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor di Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, saya memilih untuk melakukan wawancara kepada Kepala SubBid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor karena beliau memiliki data-data yang saya butuhkan dan memiliki informasi mengenai sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta berbagai penyebabnya dan saya memilih untuk melakukan wawancara kepada Kepala SubBid Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor karena beliau yang memiliki data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor serta mengetahui mengenai perkembangan efektivitas dari tahun ke tahun.

Tujuan Wawancara:

- Mencari Informasi terkait sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan penyebab penurunan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.
- Melengkapi data-data yang sudah dimiliki terkait pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.
- Sebagai bahan pembahasan dalam tugas akhir.

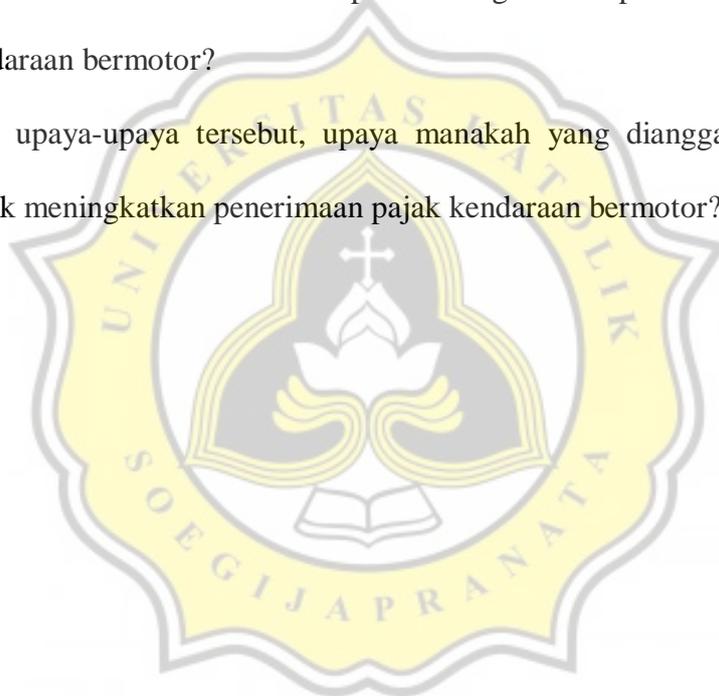
Narasumber:

1. Nama: Agustinus Darto Iwan S, S.Kom,M.Kom  
Bagian:Kepala SubBid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
2. Nama: Chaerunnisa, SE, MM  
Bagian: Kepala SubBid Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor

Pertanyaan:

1. Bagaimana sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Menurut anda, Apakah sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ini dapat berpengaruh untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor? Alasannya?

3. Mengapa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2017?
4. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?
5. Lalu upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2015-2019 untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?
6. Dari upaya-upaya tersebut, upaya manakah yang dianggap berhasil untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor?



## Hasil Wawancara

Narasumber:

1. Nama: Agustinus Darto Iwan S, S.Kom,M.Kom

Bagian:Kepala SubBid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak  
Kendaraan Bermotor

2. Nama: Chaerunnisa, SE, MM

Bagian: Kepala SubBid Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan  
Bermotor

Hasil wawancara:

Berdasarkan data Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh karena itu Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki upaya untuk meminimalkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sistem penagihan yang diterapkan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem D2D (Door to Door) dan CR (collection Room) serta melakukan razia dijalan danrazia tersebut dilakukan oleh masing-masing UPPD setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sistem D2D (Door to

Door) sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu namun untuk sistem CR (collection Room) baru muncul pada tahun 2017. Sistem tersebut dianggap berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor,

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut berasal dari PU, BBN I dan BBN II. PU berasal dari biaya pepanjangan atas kepemilikan kendaraan bermotor, BBN I berasal dari pembelian kendaraan bermotor yang baru oleh wajib pajak dan BBN II berasal dari biaya balik nama mutasi kendaraan bermotor. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari target dan realisasi mengalami penurunan karena pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pendapatan untuk penerimaan BBN I pada tahun 2017.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dilakukan beberapa upaya yaitu dengan mendekati titik layanan, mengingatkan wajib pajak, mendatangi wajib pajak, megawal wajib pajak, dibuat tidak nyaman dan diberikan penghargaan. Semua upaya tersebut dapat dianggap berhasil karena dapat berpengaruh bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor, namun upaya yang memiliki pengaruh cukup besar bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah dengan mengingatkan wajib pajak baik melalui sosialisasi dan promosi ataupun dengan sistem penagihan D2D dan CR. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah seperti wajib pajak

lupa membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak sedang tidak memiliki uang, wajib pajak sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dan wajib pajak tidak berniat untuk melaporkan mengenai status perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.

#### Kesimpulan:

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dan kurangnya pengelolaan serta pengawasan terhadap sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi faktor utama terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah yang dapat berdampak bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk mengatasi kenaikan tunggakan di tahun mendatang Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerapkan sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan sistem D2D (Door to Door) dan sistem CR (collection Room). Sistem tersebut dianggap memiliki pengaruh cukup besar bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor karena termasuk dalam upaya untuk mengingatkan wajib pajak. Penerimaan pajak kendaraan bermotor itu sendiri terdiri dari 3 komponen yaitu PU, BBN I dan BBN II. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang disebabkan tidak dapat tercapainya target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pendapatan untuk penerimaan BBN I pada tahun 2017. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor seperti dengan mendekati titik layanan, mengingatkan wajib pajak, mendatangi wajib

pajak, megawal wajib pajak, dibuat tidak nyaman dan diberikan penghargaan. Dari upaya-upaya tersebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah menghadapi beberapa kendala seperti wajib pajak lupa membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak sedang tidak memiliki uang, wajib pajak sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dan wajib pajak tidak berniat untuk melaporkan mengenai status perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.





**8.02%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #10982880

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap daerah dalam menjalankan roda perekonomiannya dengan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, pendapatan tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah, sehingga pajak daerah merupakan salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi